

MEMAHAMI PENGALAMAN SOSIALISASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH SEMARANG TIMUR YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG

Ajeng Salsabila Andini Putri¹ dan Sunarto²

¹²³Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

email: andiniiptr@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Dr. Antonius Suryo, Tembalang, Semarang Kode Pos 50275

Telepon (024) 74605407 Faksimile (024) 74605407

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman sosialisasi terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang di wilayah Semarang Timur. Penelitian ini melibatkan dua lapisan perspektif: pertama, perspektif para pengelola program di DP3A untuk menggali pengalaman mereka dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program sosialisasi KDRT, dan kedua, perspektif masyarakat penerima manfaat untuk memahami sejauh mana sosialisasi tersebut memberikan dampak dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait KDRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi kritis untuk menggali makna pengalaman para informan serta mengidentifikasi ketimpangan struktural yang memengaruhi pelaksanaan program. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, kajian literatur, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui tahapan fenomenologi, termasuk epoche process, transcendental phenomenological reduction, imaginative variation, dan synthesis of meanings and essence. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen kuat dari pengelola program, kontrol yang dilakukan masih berbasis pada hierarki formal, yang menciptakan ketimpangan dalam partisipasi dan peran para pelaksana lapangan. Selain itu, meskipun program sosialisasi KDRT sudah dilaksanakan dengan pendekatan komunikasi yang empatik dan berbasis data, evaluasi dan monitoring di lapangan masih terbatas, yang mengakibatkan kesenjangan dalam pencapaian tujuan program di tingkat komunitas. Secara keseluruhan, pengalaman sosialisasi KDRT ini mencerminkan perlunya redistribusi kuasa dalam proses pengambilan keputusan agar dampak program dapat lebih merata dan efektif di masyarakat.

Kata Kunci: Memahami Pengalaman dalam Instansi Pemerintah, Sosialisasi KDRT, DP3A Kota Semarang, Pemberdayaan Perempuan, *Transcendental Analysis*.

ABSTRACT

This study aims to understand the experience of socialization related to Domestic Violence (DV) conducted by the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DP3A) of Semarang City in the East Semarang area. This research involves two layers of perspective: first, the perspective of the program managers at DP3A to explore their experience in designing, implementing, and evaluating the DV socialization program, and second, the perspective of the community beneficiaries to understand the extent to which the socialization has impacted their awareness and understanding of DV. The study employs a critical phenomenological approach to explore the meaning of the informants' experiences and identify the structural inequalities that affect the program's implementation. Data was collected through in-depth interviews, literature review, and documentation, which were then analyzed using phenomenological steps, including the epoche process, transcendental phenomenological reduction, imaginative variation, and synthesis of meanings and essence. The results of the study indicate that although there is a strong commitment from program managers, the control exercised is still based on formal hierarchy, creating imbalances in the participation and roles of field implementers. Furthermore, despite the DV socialization program being conducted with an empathetic and data-driven communication approach, evaluation and monitoring in the field remain limited, leading to gaps in achieving program objectives at the community level. Overall, the experience of DV socialization reflects the need for the redistribution of power in decision-making processes so that the program's impact can be more evenly and effectively distributed across society.

Keywords: *Understanding Experience of Government Institutions, Domestic Violence Socialization, The Department of Women Empowerment and Child Protection of Semarang City, Women's Empowerment, Transcendental Analysis.*

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga kini masih menjadi permasalahan sosial yang mendesak untuk segera diatasi. Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam struktur sosial kerap disebut sebagai akar dari tingginya angka kekerasan ini (Purwanti, 2020). Tidak hanya budaya, faktor lain seperti ekonomi,

kecemburuan, ketidakstabilan keluarga, serta trauma masa lalu juga menjadi pemicu yang memperparah kekerasan (Soeroso, 2010). Di Indonesia, berbagai data menunjukkan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, dan salah satu daerah yang menonjol adalah Kota Semarang. Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI), Kecamatan Semarang Timur tercatat sebagai wilayah dengan kasus

KDRT tertinggi selama lima tahun terakhir. Dari total 1.314 kasus kekerasan di Kota Semarang pada periode 2019–2023, sebanyak 571 kasus di antaranya adalah KDRT. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak dalam konteks keluarga.

Tingginya angka kekerasan di Semarang Timur tidak terlepas dari berbagai faktor struktural dan sosial. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang (2024), Semarang Timur memiliki kepadatan penduduk tertinggi di kota tersebut, yang sering kali memunculkan permasalahan sosial lanjutan seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan keterbatasan akses pendidikan. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi pemicu yang memperbesar risiko terjadinya kekerasan, termasuk di dalam rumah tangga (Christiani et al., 2014). Meskipun terdapat peningkatan kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus KDRT, tren penurunan kasus masih belum signifikan. Hal ini menandakan bahwa strategi penanganan dan pencegahan yang sudah dijalankan belum sepenuhnya efektif.

Dalam upaya penanganan dan pencegahan KDRT, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

memegang peran penting. DP3A memiliki tugas untuk menyusun berbagai program strategis, mulai dari edukasi, sosialisasi, perlindungan hukum, hingga pemulihan korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. DP3A Semarang telah menjalankan beberapa program pencegahan, seperti sosialisasi di tingkat kelurahan, penguatan kapasitas kader Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA), penyuluhan dengan tokoh agama melalui program 'Masjid Ramah Anak', sosialisasi pencegahan pernikahan dini, hingga kegiatan musyawarah komunitas bersama kelompok masyarakat.

Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program-program tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Pelaksanaan sering kali tidak dilandasi survei awal yang komprehensif, evaluasi pasca kegiatan pun jarang dilakukan, serta minimnya pelibatan praktisi atau ahli di bidang perlindungan perempuan dan anak. Materi sosialisasi banyak disusun oleh pejabat struktural yang kemudian juga menyampaikannya, sehingga efektivitas pesan yang diterima masyarakat sering kali berkurang. Fokus kegiatan lebih diarahkan

pada ibu-ibu, sementara bapak-bapak jarang dijadikan target audiens, padahal mereka juga memiliki peran penting dalam konteks keluarga. Hal ini membuat transformasi nilai di masyarakat berjalan tidak merata dan belum menyentuh akar masalah secara menyeluruh.

Selain itu, dalam praktiknya, sebagian besar program DP3A lebih menekankan aspek formalitas pelaksanaan daripada memperhatikan kualitas penyampaian dan penerimaan di masyarakat. Konsistensi materi sering kali tidak terjaga karena materi yang disusun berbeda dengan yang disampaikan, dan keterlibatan masyarakat masih cenderung rendah. Berdasarkan data yang tersedia, Semarang Timur tetap berada dalam 'zona merah' dengan angka kasus KDRT yang tinggi. Kondisi ini menjadi indikator perlunya evaluasi mendalam terhadap metode sosialisasi yang digunakan serta peningkatan strategi agar lebih tepat sasaran.

Melihat fakta tersebut, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana pengalaman sosialisasi KDRT di wilayah Semarang Timur yang dilaksanakan oleh DP3A Kota Semarang. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait efektivitas, kendala, serta potensi perbaikan pada program sosialisasi, sehingga

dapat berkontribusi pada upaya penurunan angka KDRT dan terciptanya masyarakat yang lebih sadar serta responsif terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga.

KERANGKA PEMIKIRAN

Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan cara berpikir atau sudut pandang yang membantu peneliti dalam memahami dan menafsirkan realitas sosial (Guba, 1990; Patton, 1990; Sarantakos, 2013). Paradigma memberikan pedoman tentang apa yang dianggap penting dan sah, serta menjadi dasar filosofis yang membimbing peneliti dalam mengkaji kompleksitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis realitas sosial yang penuh konflik dan ketegangan, serta didasarkan pada teori kritis dan epistemologi marxisme (Halik, 2018; Neuman, 2014). Paradigma kritis menekankan bahwa realitas sosial merupakan konstruksi historis yang terus berubah akibat konflik dan kontradiksi dalam hubungan sosial. Dengan paradigma ini, penelitian tidak hanya berusaha memahami kondisi sosial, tetapi juga mendorong transformasi dan perbaikan relasi sosial yang lebih adil.

Pemilihan paradigma kritis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi KDRT yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang. Paradigma ini digunakan untuk mengkaji sejauh mana program sosialisasi mampu memberdayakan masyarakat dan mencegah terjadinya KDRT secara nyata. Selain itu, paradigma ini membantu menilai apakah DP3A telah memenuhi peran strategisnya sebagai institusi yang memberikan perlindungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, paradigma kritis mendasari analisis mendalam terhadap proses komunikasi dan produksi pesan dalam strategi sosialisasi DP3A, agar mampu memberikan alternatif perbaikan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

State of The Art

State of the art mencakup penelitian terkait yang relevan dengan topik penelitian ini. Beberapa studi terdahulu membahas interpretasi nilai-nilai yang relevan terhadap pemahaman pengalaman individu dalam menyusun atau melakukan kegiatan sosialisasi. Contoh studi adalah penelitian Ririn Triswanti et al. (2024) yang menunjukkan bahwa dengan strategi penyesuaian media dan penyajian yang mudah dipahami, kegiatan sosialisasi dalam

dunia digital dapat lebih mudah dilaksanakan. Dalam hal ini, tolak ukur keberhasilan dalam mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat diukur melalui interaksi di Instagram dan kemampuan pengurus dalam membuka diskusi. Tidak hanya itu, pengurus, yang terinspirasi oleh pengalaman diskriminasi, merasakan peningkatan pengetahuan dan kepercayaan diri.

Teori Kontrol Konservatif (*Theory of Concertive Control*)

Teori kontrol konservatif dijelaskan oleh Miller (2012) sebagai bentuk kontrol baru dalam organisasi berbasis tim, yang berfokus pada tiga konsep utama: kontrol, identifikasi, dan disiplin. Awalnya, kontrol organisasi dijalankan secara sederhana (otoriter), teknologis (melalui sistem kerja), atau birokratis (berdasarkan hierarki). Namun, dalam sistem tim modern, kontrol berpindah ke para pekerja yang bersama-sama menetapkan aturan dan norma perilaku, dengan manajemen pusat hanya berperan memberikan visi dan nilai dasar.

Konsep identifikasi mengacu pada bagaimana anggota tim merasa terhubung dengan organisasi dan menganggap nilai-nilai kelompok sebagai milik pribadi mereka. Sementara itu, disiplin muncul sebagai mekanisme pengaturan perilaku yang

dijalankan oleh anggota tim sendiri, termasuk dalam pemberian penghargaan atau hukuman, tanpa pengawasan langsung dari atasan. Contoh yang ditemukan oleh Barker menunjukkan bahwa aturan dan sanksi dibuat dan ditegakkan oleh rekan satu tim, yang justru menciptakan disiplin lebih kuat dibanding kontrol birokratis.

Teori ini menekankan bahwa meskipun tampak demokratis, ideologi manajemen tetap bertahan melalui internalisasi nilai oleh pekerja. Dalam konteks penelitian ini, teori kontrol konservatif digunakan untuk menganalisis bagaimana DP3A Kota Semarang mengatur komunikasi dan strategi sosialisasi KDRT. Penelitian ini menilai apakah pekerja DP3A sudah menginternalisasi tujuan lembaga, menjalankan peran secara mandiri, dan menerapkan prinsip demokratis dalam menyusun serta melaksanakan program. Fokus utamanya ialah pada bagaimana produksi pesan disusun dan diimplementasikan, apakah murni atas kesadaran kolektif atau sekadar mengikuti instruksi atasan.

Feminisi Sosialis (*Socialist Feminists*)

Feminisme sosialis merupakan aliran feminisme yang menekankan bahwa penindasan terhadap perempuan disebabkan oleh dua sumber utama, yaitu kapitalisme dan

patriarki (Tong, 2009). Dalam perspektif ini, kapitalisme dianggap menghasilkan segregasi peran, di mana laki-laki mendominasi ranah publik sementara perempuan dibatasi di ranah domestik. Feminisme sosialis juga sejalan dengan feminisme radikal yang menganggap patriarki sebagai sumber dominasi yang harus dihancurkan. Oleh karena itu, feminisme sosialis memandang perlu adanya perubahan sistem menuju sosialisme agar perempuan memiliki kebebasan sejati, setara dengan laki-laki, dan tidak lagi bergantung secara ekonomi maupun sosial.

Selain itu, feminis sosialis berpendapat bahwa pekerjaan rumah tangga harus dihargai setara dengan pekerjaan lain, bahkan layak diberi upah, karena kontribusinya yang besar pada masyarakat (Tong, 2009). Juliet Mitchell menekankan perlunya perubahan menyeluruh dalam faktor produksi, reproduksi, seksualitas, dan sosialisasi anak demi kebebasan perempuan. Alison Jaggar juga menambahkan bahwa sistem kapitalisme menyebabkan alienasi perempuan, menjauhkan mereka dari rasa utuh dalam pekerjaan dan relasi sosial.

Dalam konteks penelitian ini, feminisme sosialis relevan untuk menjelaskan mengapa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Semarang Timur

kerap terjadi, terutama akibat dominasi laki-laki yang diperkuat oleh sistem ekonomi kapitalis. Faktor ekonomi sering menjadi alasan dominasi dan kekerasan terhadap perempuan, yang memperlihatkan bagaimana kapitalisme dan patriarki saling mendukung dalam menciptakan ketidaksetaraan gender.

Memahami Konsep Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses penting dalam sosiologi yang berperan membentuk individu agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat (Long & Hadden, 1985). Horton dan Hunt (1968) mendefinisikannya sebagai proses internalisasi norma, nilai, dan budaya, sehingga individu memperoleh keterampilan dan pengetahuan sosial. Sosialisasi memungkinkan seseorang memahami struktur sosial, mengembangkan identitas diri, dan belajar berinteraksi dengan orang lain.

Proses sosialisasi dimulai sejak kecil dan berlangsung seumur hidup, dengan keluarga, sekolah, kelompok bermain, dan media massa sebagai agen utama. Tahap awal disebut sosialisasi primer, di mana individu belajar nilai dan norma dasar dalam keluarga yang menjadi fondasi kepribadian dan kemampuan adaptasi sosial. Setelah itu, individu memasuki tahap sosialisasi sekunder, yaitu proses belajar norma dan

peran khusus di kelompok sosial tertentu, seperti organisasi atau komunitas.

Selain dua tahap utama tersebut, terdapat sosialisasi antisipatif, yaitu persiapan mental dan perilaku untuk peran sosial di masa depan. Proses ini membantu individu mengantisipasi tuntutan peran baru, misalnya anak-anak yang bermain peran sebagai orang dewasa atau mahasiswa kedokteran yang melatih keterampilan klinis. Terakhir, resosialisasi adalah tahap di mana seseorang melepas identitas lama dan membentuk identitas baru, seperti saat pindah negara atau setelah keluar dari penjara. Tahap ini bisa terjadi secara sukarela atau tidak, dan memerlukan dukungan untuk mempermudah transisi. Keseluruhan proses sosialisasi memungkinkan individu beradaptasi, berkontribusi, serta menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan sosialnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain fenomenologi. Penelitian kualitatif bertujuan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap fenomena sosial melalui deskripsi mendalam berdasarkan data nyata (Creswell, 2014). Desain fenomenologi dipilih agar peneliti dapat menggali makna pengalaman partisipan terkait sosialisasi KDRT oleh DP3A Kota Semarang, sehingga

mampu memahami realitas sebagaimana dialami langsung oleh informan (Moustakas, 1994).

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja sesuai kriteria yang relevan. Informan terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, staf, serta pendamping lapangan DP3A Kota Semarang. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan kemudian diuraikan dalam bentuk transkrip.

Sumber data terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dengan pihak internal DP3A, dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, jurnal, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur, yang memadukan pertanyaan terarah dan fleksibel untuk menggali informasi lebih dalam. Wawancara dilakukan dengan prinsip reflektivitas, naturalisme, keutamaan responden, keterbukaan, serta fleksibilitas agar percakapan dapat mengalir secara alami.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan fenomenologi transendental melalui tahap epoche, reduksi fenomenologis, variasi imajinatif, hingga sintesis makna dan esensi (Moustakas, 1994).

Peneliti meninjau transkrip, mengidentifikasi tema-tema utama, menyusun deskripsi tekstural-struktural, dan menggabungkan pengalaman seluruh informan menjadi satu deskripsi komposit yang menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Tekstural Pengalaman Sosialisasi KDRT di Wilayah Semarang Timur yang Dilaksanakan oleh DP3A Kota Semarang

Keempat informan memperlihatkan penerapan bentuk kontrol yang beragam, mulai dari kontrol sederhana, teknologis, hingga birokratis. Meskipun memiliki gaya masing-masing, semuanya menekankan pentingnya komunikasi yang intens, pengawasan yang adaptif, kolaborasi lintas bidang, serta pemanfaatan teknologi sebagai pendukung utama. Pemimpin cenderung menggabungkan beberapa bentuk kontrol untuk mendorong partisipasi dan menjaga stabilitas organisasi, sementara staf lapangan lebih menonjolkan inisiatif pribadi dan fleksibilitas dalam menangani kondisi di lapangan.

Pemahaman karakter individu para informan tercermin dalam kemampuan mengelola emosi, menunjukkan empati tinggi, serta adaptasi yang baik terhadap situasi yang dinamis. Komunikasi terbuka

diakui sebagai kunci utama dalam membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan mendorong kerja sama baik dengan rekan kerja maupun masyarakat. Fondasi kemanusiaan dan nilai moral menjadi pegangan dalam membangun kepemimpinan yang inklusif serta pelayanan sosial yang responsif.

Dalam memahami permasalahan, keempat informan menunjukkan ketangguhan mental dan kepedulian sosial yang tinggi. Mereka menekankan perlunya analisis mendalam sebelum bertindak, termasuk mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, budaya, serta hukum yang memengaruhi KDRT. Penyesuaian strategi secara kontekstual di lapangan dianggap penting agar pendekatan yang diambil lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Kolaborasi lintas sektor juga dianggap krusial dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dan memperluas dampak program.

Solusi yang ditawarkan oleh informan menekankan pendekatan berpikir kritis, adaptif, kolaboratif, serta pentingnya komunikasi yang terbuka. Strategi yang diusulkan meliputi pembentukan tim kecil yang solid, perubahan segmentasi target sosialisasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan pemahaman

akan konflik dan manajemen sosial. Semua ini ditujukan untuk mewujudkan perubahan jangka panjang dan berkelanjutan yang mampu mengurangi angka KDRT di masyarakat.

Keterhubungan individu dengan instansi terlihat dari komitmen para informan terhadap visi dan misi organisasi. Mereka menyadari pentingnya empati, komitmen pada tujuan bersama, serta keterlibatan aktif untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Komunikasi yang inklusif dan kolaborasi erat menjadi landasan utama untuk memperkuat sinergi internal serta membangun kepercayaan publik terhadap DP3A.

Tindakan yang dilakukan oleh para informan meliputi inovasi, pembentukan jejaring kerja sama lintas sektor, diskusi rutin, serta pengambilan keputusan yang berbasis pada data dan analisis mendalam. Mereka menekankan bahwa penyelesaian masalah tidak hanya berorientasi pada solusi instan, tetapi harus membangun dampak sosial jangka panjang melalui edukasi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pencegahan kekerasan berulang.

Dalam hal kesetaraan gender, seluruh informan menunjukkan pemahaman yang progresif. Mereka percaya bahwa peran laki-laki dan perempuan harus setara dalam rumah

tangga, lingkungan kerja, maupun masyarakat luas. Pemberdayaan ekonomi perempuan dianggap sebagai kunci penting untuk mengurangi ketergantungan ekonomi yang kerap menjadi pemicu KDRT. Edukasi, perubahan pola pikir, dan dukungan kebijakan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan setara gender.

Kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan instansi menjadi prinsip dasar bagi informan, yang menekankan integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab kolektif. Mereka berkomitmen menjalankan tugas sesuai prosedur demi menjaga kualitas program dan membangun kepercayaan masyarakat.

Terakhir, metode pembinaan dan penegakan kedisiplinan oleh pimpinan diterapkan dengan pendekatan humanis, persuasif, serta penghargaan terhadap kontribusi individu. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi tidak hanya berfokus pada aturan semata, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Deskripsi Struktural Pengalaman Sosialisasi KDRT di Wilayah Semarang

Timur yang Dilaksanakan oleh DP3A Kota Semarang

Deskripsi struktural pengalaman para informan dalam menjalankan sosialisasi KDRT di DP3A Kota Semarang menunjukkan bagaimana strategi kontrol program kerja diatur secara dinamis dan integratif. Keempat informan mengombinasikan budaya kolaboratif, pemanfaatan teknologi, serta kepatuhan birokrasi untuk membangun sistem yang efektif, efisien, dan tetap adaptif. Kontrol sederhana diterapkan melalui komunikasi terbuka, monitoring lapangan, serta diskusi rutin, yang mendorong partisipasi anggota tim dan membangun rasa kepemilikan bersama. Di sisi lain, kontrol teknologis memanfaatkan platform digital seperti WhatsApp Group, aplikasi analitik ASIKK-PAK, media sosial, dan website resmi untuk memperlancar koordinasi, memfasilitasi pelaporan, serta menjaga transparansi kepada publik. Kontrol birokratis tetap dipegang teguh melalui pelaporan berjenjang dan kepatuhan pada struktur, tetapi dijalankan secara fleksibel agar tetap mendorong kreativitas dan respons cepat terhadap dinamika lapangan.

Pengaruh kepribadian informan menjadi fondasi kuat dalam menggerakkan organisasi. Nilai kemanusiaan, empati,

penghargaan terhadap peran perempuan, serta keterbukaan terhadap perubahan dan inovasi sangat melekat dalam kepribadian mereka. Internalisasi nilai-nilai ini tidak hanya sebatas wacana, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari, misalnya mengutamakan keselamatan korban, membangun suasana kerja harmonis, serta mendukung kemandirian perempuan. Mereka juga menunjukkan ketenangan dan kesabaran tinggi saat menghadapi konflik, menekankan komunikasi santun dan pembinaan humanis. Kepribadian yang adaptif, kolaboratif, dan reflektif ini menjadi modal penting dalam mendorong terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan mendukung transformasi sosial.

Kemampuan *problem solving* para informan ditunjukkan melalui analisis mendalam, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Mereka memahami bahwa permasalahan sosial seperti KDRT tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan seragam. Analisis situasi yang kontekstual, pemahaman mendalam terhadap faktor sosial, ekonomi, budaya, hingga kepadatan penduduk menjadi dasar penting dalam menentukan strategi. Para informan juga berani mencoba inovasi, misalnya dengan mengalihkan fokus sosialisasi kepada laki-laki untuk mempercepat perubahan pola pikir

dan mencegah kekerasan. Monitoring, evaluasi rutin, serta keterlibatan masyarakat dalam forum diskusi juga menjadi kunci menjaga relevansi program. Fokus jangka panjang pada perubahan sosial berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi, dan pendidikan menjadi pilar utama dalam menyusun solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga membangun ketahanan masyarakat.

Peran individu tidak sekadar sebagai pelaksana teknis atau administratif, tetapi sebagai agen perubahan yang menjembatani visi dan kebijakan organisasi dengan kebutuhan nyata di lapangan. Para informan aktif terlibat dalam musyawarah, perencanaan strategis, serta membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti PKK, JPPA, LPMK, dan lembaga hukum. Mereka menyadari bahwa isu-isu seperti KDRT membutuhkan pendekatan yang lebih personal, dialogis, dan berbasis empati, bukan sekadar prosedural. Kesadaran ini juga terlihat dalam cara mereka menyesuaikan pendekatan dengan budaya lokal, menyusun strategi pemberdayaan yang relevan, serta mendorong partisipasi masyarakat secara inklusif.

Pemahaman terhadap kesetaraan gender menjadi prinsip penting yang dipegang para informan. Mereka memandang

kesetaraan bukan sekadar pembagian peran administratif, tetapi sebagai pengakuan hak, kebebasan, serta kapasitas perempuan dalam menentukan pilihan hidup. Perempuan didorong untuk mandiri secara ekonomi dan sosial, sehingga tidak bergantung pada laki-laki yang kerap menjadi pemicu KDRT. Para informan juga mendorong edukasi publik, advokasi, dan kolaborasi lintas gender, agar laki-laki pun turut serta dalam upaya pencegahan kekerasan. Kesetaraan dipahami sebagai proses transformasi sosial yang berkelanjutan, menuntut perubahan pola pikir kolektif, pembaruan struktur sosial, dan penciptaan lingkungan yang mendukung di semua level.

Disiplin dijalankan bukan hanya sebagai kewajiban formal, melainkan sebagai cerminan tanggung jawab moral, komitmen profesional, dan kepedulian sosial. Para informan menekankan disiplin yang tumbuh dari kesadaran, bukan sekadar rasa takut pada hukuman. Pendekatan persuasif, pembinaan personal, serta penghargaan terhadap kinerja dijadikan metode utama dalam menanamkan disiplin. Apresiasi sederhana seperti ucapan terima kasih dianggap efektif dalam menjaga motivasi dan kekompakan tim. Disiplin dilihat sebagai fondasi terciptanya lingkungan kerja yang adil, produktif, dan saling menghargai, sehingga mendukung

tercapainya tujuan organisasi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, deskripsi struktural ini menunjukkan integrasi erat antara kontrol program yang adaptif, kepribadian yang humanis dan reflektif, kemampuan problem solving yang inovatif, peran individu yang transformatif, komitmen terhadap kesetaraan gender, serta penerapan disiplin yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Seluruh pengalaman ini membentuk ekosistem kerja DP3A Kota Semarang yang inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada perubahan sosial yang mendalam dan berkelanjutan, serta memperkuat posisi organisasi sebagai agen pelindung dan pemberdaya masyarakat.

Esensi Pengalaman

Dalam lingkup kerja DP3A Kota Semarang, khususnya dalam penanganan wilayah Semarang timur, para Informan melaksanakan peran mereka dengan pendekatan kolaboratif, adaptif, dan humanis, memanfaatkan teknologi komunikasi, komunikasi terbuka, dan empati sebagai strategi utama untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Di tengah tantangan nyata seperti resistensi budaya, keterbatasan birokrasi, dan pola pikir masyarakat yang masih kolot, para informan senantiasa dituntut untuk memberikan respons cepat

terhadap segala permasalahan tersebut. Meskipun begitu, keempat informan tetap menunjukkan komitmen terhadap perubahan melalui kepemimpinan partisipatif, inisiatif yang besar, dan kegigihan dalam menghadapi segala tantangan di lapangan. Dengan demikian, mereka membuktikan bahwa integrasi nilai-nilai etika, pendekatan reflektif, serta inovasi dalam penyelesaian masalah mampu mendorong transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pengalaman sosialisasi KDRT di wilayah Semarang Timur yang dilaksanakan oleh DP3A Kota Semarang menunjukkan ketimpangan dalam pelaksanaan program antara pengelola tingkat struktural dan pelaksana lapangan, yang tercermin dalam ketidakseimbangan kekuasaan dalam proses perencanaan dan evaluasi. Meskipun terdapat komitmen moral yang tinggi dan kesadaran kolektif di kalangan para pengelola program, perbedaan posisi dalam hierarki birokrasi memengaruhi sejauh mana suara para pelaksana lapangan didengar dan dihargai dalam pengambilan keputusan. Informan 1, sebagai pejabat struktural, sering kali lebih diterima dan dihormati oleh masyarakat, karena dianggap sebagai representasi institusi, sementara informan 2, 3, dan 4 yang berada di level staf lebih sering mengalami

marjinalisasi, bahkan ketika mereka memiliki pengetahuan praktis yang lebih mendalam terkait kondisi lapangan. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun program dirancang secara partisipatif, relasi kuasa struktural tetap mendominasi, sehingga pengetahuan yang dihasilkan oleh pelaksana lapangan tidak selalu dianggap valid dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Ketimpangan ini diperburuk oleh struktur kontrol yang berbasis pada hierarki birokratis yang terlalu kaku. Meskipun kontrol dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti kontrol sederhana, teknologis, dan birokratis, pengelolaan tugas yang tidak merata menjadi masalah utama, di mana individu yang dianggap "serba bisa" sering menerima beban kerja lebih banyak. Kontrol ini juga tidak sepenuhnya menjangkau lapisan masyarakat, seperti yang terlihat dalam ketidaktercapaian program di beberapa wilayah, terutama wilayah dengan kasus KDRT yang tinggi seperti Kemijen. Selain itu, evaluasi dan monitoring yang tidak optimal disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun materiil, yang memperparah ketimpangan distribusi program, dan tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan sosialisasi secara merata.

Dalam konteks sosial, struktur patriarki yang masih kuat di Semarang Timur memperburuk ketidakadilan yang dialami perempuan, yang sering kali terjebak dalam pola 'double burden', yakni beban ganda sebagai pekerja profesional sekaligus pengelola rumah tangga. Meskipun sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang KDRT, kenyataan bahwa perempuan masih menduduki posisi subordinat dalam struktur sosial memperlihatkan bahwa perubahan sosial yang diinginkan tidak cukup hanya dengan pendekatan informasi atau edukasi semata. Proses sosialisasi, yang idealnya memberikan ruang bagi pemberdayaan masyarakat, masih dibatasi oleh struktur kuasa yang terpusat pada level tertentu.

Dari perspektif paradigma kritis, kesenjangan ini menggambarkan pentingnya redistribusi kuasa dalam struktur birokrasi, serta perlunya pembentukan mekanisme kontrol dan evaluasi yang lebih inklusif, yang dapat menampung suara-suara mereka yang berada di lapangan. Dengan demikian, untuk mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan, program sosialisasi KDRT perlu melibatkan semua pihak secara setara dalam proses pengambilan keputusan, serta memperkuat mekanisme evaluasi berbasis partisipasi masyarakat agar program dapat

lebih efektif menjangkau seluruh lapisan komunitas yang membutuhkan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap, dari perencanaan hingga evaluasi, akan memperbesar dampak program dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan berbagai implikasi yang ditemukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk penguatan program sosialisasi KDRT serta pengembangan organisasi ke depan.

Saran Teoritis

Penelitian ini mendorong pengembangan lebih lanjut terhadap teori Concertive Control dengan menyesuaikannya pada konteks organisasi pemerintah yang memiliki kultur kekeluargaan dan informalitas tinggi. Penyesuaian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana kontrol nilai kolektif dapat memengaruhi keadilan pembagian kerja, loyalitas anggota, serta efektivitas layanan publik. Selain itu, integrasi perspektif feminisme struktural juga diusulkan untuk memperdalam analisis ketimpangan gender dan beban ganda perempuan dalam pelaksanaan program

sosial, khususnya pada isu KDRT. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk meneliti praktik internalisasi nilai dalam instansi pemerintah, serta pengaruhnya terhadap kinerja dan inovasi anggota tim.

Saran Praktis

DP3A disarankan melakukan survei dan observasi lapangan secara berkala sebelum menyusun program sosialisasi, agar strategi yang disusun lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pembagian tugas internal perlu ditata lebih adil dan proporsional untuk menghindari beban kerja ganda, serta diiringi dengan pelatihan berkelanjutan guna memperkuat kapasitas SDM, khususnya pendamping lapangan. Pendekatan sosialisasi yang lebih partisipatif juga perlu dikembangkan dengan melibatkan kelompok laki-laki dan institusi pendidikan, sebagai upaya pencegahan kekerasan sejak dini dan membangun kesadaran bersama.

Saran Sosial

Masyarakat perlu lebih dilibatkan dalam evaluasi program melalui forum warga, diskusi komunitas, serta pelaporan berbasis digital, guna meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan perbaikan program secara berkelanjutan. Program pemberdayaan ekonomi perempuan juga

perlu diperluas, melalui pelatihan kewirausahaan, dukungan akses permodalan, dan pendampingan usaha, khususnya di wilayah dengan tingkat kekerasan tinggi. Hal ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap pelaku dan menurunkan potensi kekerasan berulang. Terakhir, edukasi publik harus diperluas melalui kegiatan langsung di komunitas rentan serta penggunaan media digital yang komunikatif untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mengurangi stigma terhadap korban KDRT.

Keseluruhan saran ini diharapkan dapat memperkuat peran DP3A dalam menyelenggarakan sosialisasi KDRT yang lebih efektif, merata, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan utama untuk menciptakan masyarakat yang sadar, berdaya, dan bebas dari kekerasan dapat tercapai secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Semarang. (2024). Diakses melalui <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDgjMg==/kepadatan-penduduk.html> pada tanggal 14/08.
- Christiani, Tedjo, dan Martono. (2014). Analisis Dampak Kepadatan Penduduk terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Untag*. 3(1). <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/125>.

- Creswell, J.W., (2014). *Fourth Edition Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Halik, A., (2018). Paradigma Kritik Penelitian Komunikasi (Pendekatan Kritis-Emansipatoris dan Metode Etnoigrafi Kritis). *Jurnal Tabligh*. 19 (2). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/7473>.
- Horton, P.B. dan Hunt, C.L. (1968). *Sociology Second Edition*. United States of America: McGraw-Hill.
- Long, T.E. dan Hadden, J.K. (1985). "A Reconception of Socialization". *JSTOR*. 3(1). https://www.jstor.org/stable/202172?casa_token=RZaJQTcZ2nQAAAAA%3Ab5SVmz-k79ian84G3NuYub5IKeDQdc0CvU5F7MAX_3mmYQuRlqvGMZr_4VeM1kJS3xoosi66ZXAsGjq3Lavzven7awkY_kSQKpnOXez8C46bO8wxtA.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. California: SAGE Publications.
- Neuman, W.L., (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. United States of America: Pearson Education.
- Purwanti, Ani. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: BILDUNG.
- Sarantakos, S., (2013). *Social Research 4th Edition*. United Kingdom: Palgrave Macmilan.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tong, R. (2009). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Philadelphia: Westview Press.
- Triswanti, R, Sunarto, dan Hasfi, N. (2024). "Memahami Sosialisasi Kesetaraan Gender melalui Media Sosial Instagram Girl Up Diponegoro". *Interaksi Online*. 12(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/45194>.